



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Faktor-faktor Dibalik Keluarnya Indonesia dari OPEC
(2016)

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Harits Ardiono Rakhmadi

2016330220

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Faktor-faktor Dibalik Keluarnya Indonesia dari OPEC (2016)

Skripsi

Oleh:

**Harits Ardiono Rakhmadi
2016330220**

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Harits Ardiono Rakhmadi
Nomor Pokok : 2016330220
Judul : Faktor-faktor Dibalik Keluarnya Indonesia dari OPEC (2016)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 15 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Ratih Indraswari, S.IP

Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Harits Ardiono Rakhmadi

NPM: 2016330220

Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional

Judul: **Faktor-faktor Dibalik Keluarnya Indonesia dari OPEC (2016)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya tulis pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 29 Oktober 2019



Harits Ardiono Rakhmadi

2016330220

Abtrak

Nama : Harits Ardiono Rakhmadi

NPM : 2016330220

Judul : Faktor-faktor Dibalik Keluarnya Indonesia dari OPEC (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau faktor pendorong yang membuat Indonesia untuk membekukan keanggotaan *Organization Petroleum Exporting Countries* (OPEC) pada tahun 2016. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia yang baru saja bergabung kembali ke dalam organisasi internasional ini sudah memutuskan untuk memberhentikan keterlibatannya di dalam organisasi ini, kurang dari satu tahun. Pada awal tahun 2016 keadaan industri minyak dalam negeri masih sangat memprihatinkan, tetapi pemerintah memutuskan bahwa pada saat itu langkah yang terbaik untuk diambil oleh Indonesia adalah bergabung kembali dengan OPEC. Lalu apa sajakah yang menjadi alasan utama untuk Indonesia keluar, walaupun hanya baru bergabung kembali beberapa bulan saja? Ada empat faktor yang mempengaruhi keluarnya Indonesia dari OPEC, pertama adalah *over supply shale oil* Amerika Serikat, yang mengurangi demand minyak. Kedua, pembangunan dibawah Nawacita, yang membutuhkan pendanaan, sedangkan OPEC pada saat itu terlihat sebagai beban dibandingkan mitra bisnis yang berpotensi. Ketiga, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan kualitas hidup masyarakat dengan subsidi BBM. Subsidi yang telah dicabut membuat pemerintah harus melakukan kebijakan yang membantu pemulihan perekonomian Indonesia, yang salah satunya adalah penghematan pengeluaran pemerintah di sektor yang tidak produktif. Faktor terakhir adalah terbatasnya penemuan sumur-sumur minyak baru, industri minyak mengalami penurunan yang drastis beberapa tahun terakhir, karena sudah melampaui puncak produksinya dan minimnya penemuan sumur-sumur baru.

Kata Kunci : *Organization Petroleum Exporting Countries, Nawacita, Shale oil, Subsidi BBM*

Abstract

Nama : Harits Ardiono Rakhmadi
NPM : 2016330220
Judul : Factors Behind Indonesia's Exit from OPEC (2016)

This study aims to find out the reasons or motivating factors that made Indonesia freeze the Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC) membership in 2016. This happened because Indonesia, which had just rejoined the international organization, had decided to stop its involvement in this organization. less than one year. At the beginning of 2016 the domestic oil industry was still very concerning, but the government decided that at that time the best step for Indonesia to take was to rejoined OPEC. Then what are the main reasons for Indonesia to quit, even though they only rejoined for a few months? There are four factors that influence Indonesia's exit from OPEC, firstly over supply of the US shale oil, which reduces oil demand. Second, development under Nawacita, which needed help, while OPEC at the time was seen as being funded by the business partners who were moved. Third, the government policy to maintain the quality of life of the people with fuel subsidies. Subsidiaries that have been revoked make the government must implement policies that help return Indonesian money, one of which is government savings in unproductive sectors. The last factor is the limitation of new oil wells, the oil industry has decreased dramatically in the last few years, because it has exceeded the peak of production and the lack of new well discoveries.

Key Words: Organization Petroleum Exporting Countries, Nawacita, Shale oil, Fuel Subsidies

Kata Pengantar

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Faktor-faktor Dibalik Keluarnya Indonesia dari OPEC (2016)” disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam jenjang Pendidikan Strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis sangat menerima saran dan kritik yang dapat melengkapi skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat membawa bermanfaat bagi pembaca.

Daftar Isi

Pernyataan	iii
Abtrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	viii
Bab I	11
1.1. Latar Belakang Masalah	11
1.2. Identifikasi masalah	12
1.2.1. Pembatasan Masalah.....	13
1.2.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Kegunaan Penelitian	14
1.4. Kerangka Pemikiran	14
1.4.1. Kajian Literatur.....	14
1.4.2. Kerangka Pemikiran	18
1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
1.5.1. Metode Penelitian	28
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.6. Sistematika Penulisan	29
BAB II OPEC Sebagai Organisasi yang Mengatur Produksi	31
2.1. Sejarah OPEC	31
2.2. OPEC dan Pasar Minyak	34
2.3. Misi	35
2.4. Negara Anggota	35
2.5. Peran dan Fungsi OPEC bagi Indonesia	37
BAB III Sektor Minyak Indonesia	43
3.1 Industri Minyak Indonesia pada Orde Baru.....	43
3.2 Awal Mula Indonesia di OPEC	44

3.2. Perusahaan Penyumbang Lifting Terbesar Selama 2016.....	49
3.2.1 PT Chevron Pacific Indonesia	49
3.2.2 Mobil Cepu Ltd.....	51
3.2.3 PT Pertamina EP.....	53
3.2.4 Total EP Indonesia.....	54
3.3 Kebijakan Pemerintah.....	56
Bab IV Faktor –faktor Pendorong keluarnya Indonesia dari OPEC (Tahun 2016).....	58
4.1. Shale Oil Amerika Serikat yang Mengurangi Demand Minyak dan Menimbulkan Penurunan Harga Minyak 2014.....	58
4.2. Pembangunan Dibawah Nawacita yang Membutuhkan Pendanaan.....	61
4.3. Kebijakan Mempertahankan Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Subsidi BBM.....	67
4.4. Terbatasnya Penemuan Sumur-sumur Minyak Baru.....	72
Bab V Kesimpulan.....	79
Daftar Pustaka.....	82

DAFTAR GRAFIK, GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-rata produksi PT Chevron Pacific Indonesia (2016).....	50
Tabel 1.2 Rata-rata produksi Mobil Cepu Ltd (2016).....	52
Tabel 1.3 Rata-rata produksi PT Pertamina EP (2016).....	53
Tabel 1.4 Rata-rata produksi Total EP Indonesia (2016).....	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Profil Produksi Minyak dan Gas Indonesia	45
Grafik 1.2 Perbandingan Antara Produksi dan Permintaan Minyak Dunia.....	46
Grafik 1.3 Sejarah Harga Minyak Dunia.....	46
Grafik 1.4 Subsidi Energi Indonesia.....	70
Grafik 1.5 Persentase Pengeluaran Pemerintah Untuk Subsidi Energi.....	76

Bab I

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah bergabung dengan OPEC sejak tahun 1962, awalnya Indonesia sangat aktif dalam organisasi ini. Di tahun 1970an saja, produksi minyak Indonesia melebihi angka 1,6 juta barel per harinya. Tetapi di beberapa dekade terakhir produksi minyak Indonesia kian menyusut dan membuat Indonesia cenderung sebagai net-importir ketimbang exportir. Sehingga membuat Indonesia merasa tidak relevan lagi untuk tetap bergabung dengan organisasi ini. Organization of the Petroleum Exporting Countries atau yang sering disebut OPEC, merupakan organisasi intergovernmental yang dibentuk di *Baghdad Conference* di tahun 1960. Organisasi ini dipeloporkan oleh Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela.¹

Berdirinya organisasi negara-negara pengeksportir minyak ini dipicu oleh keputusan dari perusahaan-perusahaan minyak multinasional yang memonopoli industri perminyakan dan menetapkan harga secara sepihak pada tahun 1959/1960. Perusahaan minyak tersebut dikenal dengan nama The Seven Sisters yang didalamnya terdiri dari tujuh perusahaan minyak besar, diantaranya Standard Oil Company of California (Socal) sekarang menjadi Chevron, Texas Company (Texaco), Exxon Mobil, Standard Oil Company of New York (Socony)

OPEC sendiri, mempunyai misi yaitu untuk menstabilkan harga minyak, membentuk kebijakan terkait dengan minyak dan memastikan kestabilan suplai minyak dunia yang diproduksi oleh para negara anggota. Pada tahun 1977, produksi minyak Indonesia mencapai 1,65 juta barel per hari, membuat Indonesia sebagai produsen terbesar ke 11 pada saat itu.²

¹ "Brief History." opec.org. diakses Februari 10, 2019.

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm

² "Indonesia Dahulu Produsen Minyak Bumi, Kini Importir, Kenapa?" Mikhael Gewati. kompas.com. diakses Februari 10, 2019 <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/130700626/indonesia-dahulu-produsen-minyak-bumi-kini-importir-kenapa>

Angka tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi Indonesia. Tetapi mengapa Indonesia memilih untuk keluar masuk dari organisasi ini?

Indonesia telah dua kali keluar dan masuk OPEC, setelah masuk di tahun 1962, Indonesia memutuskan untuk menunda keanggotaannya untuk sesaat diawal 2009, lalu melanjutkannya pada awal tahun 2016 dan keluar dari keanggotaannya kembali pada November 2016. Kebijakan pemerintah yang bersifat berubah-ubah atau maju mundur tersebut tentu saja mengundang tanda tanya ke banyak pihak. Lalu apakah alasan Indonesia keluar kali ini merupakan hal yang menguntungkan atau malah merugikan Indonesia, karena keluar dan masuk organisasi ini tentu saja berpengaruh kepada kebijakan luar negeri Indonesia dan APBN. Contohnya saja APBN 2016 dalam sektor minyak dan gas hanya sebesar 13%, sedangkan pada tahun 1990 sebesar 40%.³

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengambil topik dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor Indonesia Keluar dari OPEC pada tahun 2016”. Penulis akan mencoba menganalisa alasan Indonesia keluar dari OPEC pada tahun 2016, dan mencoba mengetahui alasan-alasan yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut.

1.2. Identifikasi masalah

Setelah OPEC didirikan pada tahun 1960, organisasi ini telah berkembang secara kuantitas anggota maupun secara kekuatan. Ini dapat dibuktikan dengan embargo minyak yang dilakukan oleh OPEC kepada US pada tahun 1973. Embargo ini berawal dari perang Negara-negara Arab dan Israel. US sebagai sekutu dengan pada saat itu, membantu Israel dalam bidang

³ “Minyak Bumi.” Indonesia-investments. indonesia-investments.com. diakses Februari 10, 2019 <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267?>

persenjataan. Tindakan inilah yang membuat OPEC merasa terprovokasi, sehingga memunculkan embargo kepada US.

Sebagaimana seperti yang telah dinyatakan pada latar belakang masalah, keluar dan masuknya Indonesia dari keanggotaan OPEC, menimbulkan kebingungan di antara negara-negara di dunia internasional atas keseriusan Indonesia dalam mengikuti organisasi yang didirikan berdasarkan industri minyak ini. Sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang mengamati kebijakan luar negeri pemerintah, penulis skeptik atas keputusan pemerintah yang sifatnya berubah. Sehingga penulis membuat skripsi ini dalam rangka menganalisa alasan atau faktor apa saja yang membuat pemerintah memutuskan untuk Indonesia keluar dari OPEC (2016).

1.2.1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membatasi periode penelitian sepanjang 2014 (setelah Joko Widodo menjadi Presiden) sampai dengan 2019, tahun terakhir kepemimpinan Joko Widodo di putaran pertama. Penulis berasumsi bahwa selama kurun waktu beberapa bulan tersebut, kebijakan pemerintah seharusnya sudah matang dalam membuat keputusan yang akhir, yaitu keluarnya Indonesia dari OPEC.

1.2.2. Perumusan Masalah

Masalah yang diambil sebagai masalah utama yang akan digali pada skripsi ini adalah mengapa Indonesia bergabung kembali menjadi anggota OPEC pada awal tahun 2016 dan keluar kembali di bulan November? Tentu saja keputusan ini membuat banyak pertanyaan tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Banyak pihak yang mengaukan keseriusan Indonesia untuk menjadi anggota OPEC. Oleh karena itu, dalam skripsi

ini penulis akan mencoba menjelaskan Faktor-faktor Dibalik Keluarnya Indonesia dari OPEC (2016).

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemerintah membekukan keanggotaan Indonesia di OPEC pada tahun 2016, walau hanya kembali bergabung selama kurang lebih satu tahun. Selain itu, setelah menipisnya produksi minyak di Indonesia, apa yang membuat pemerintah untuk memutuskan bergabung kembali dengan OPEC pada awal tahun 2016.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat menambah sudut pandang mahasiswa Hubungan Internasional yang mempelajari organisasi OPEC dan mengetahui faktor apa saja yang membuat pemerintah membekukan keanggotaan Indonesia pada tahun 2016. Yang seperti banyak pihak ketahui Indonesia baru saja bergabung pada awal tahun tersebut, dan keluar kurang lebih pada akhir tahun. Sehingga penulis akan mencoba menganalisa alasan-alasan Indonesia keluar pada tahun tersebut, walau hanya baru bergabung kembali selama kurang lebih satu tahun.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kajian Literatur

Dari segi objektif pemerintah, Anne Booth menjelaskan bahwa ada kemungkinan keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC berawal dari perubahan struktural di tahun 1970. Penurunan di bidang agrikultur, pertambangan dan manufaktur. Dan peningkatan di sektor baru seperti perbankan dan publik administrasi membuat fokus pemerintahan tergeser. Sehingga

investasi dibidang industri minyak pun ikut menurun. Karena reservoir minyak di daerah Indonesia kian menipis, dan investasi dan fokus pemerintah yang bergeser membuat sektor minyak terbengkalai. Selain itu Booth juga menjelaskan bahawa *educational advancement and changing patterns of employment* yang berpengaruh dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, ada peningkatan dalam tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Peningkatan yang terjadi selama tahun 1963/1964 sampai tahun 1983/1984 terjadi berkat keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat.⁴

Sedangkan dari segi kebijakan pemerintah Indonesia dalam permasalahan ini, dapat dijelaskan dengan teori yang di publikasikan oleh William D Coplin. Dalam jurnal tersebut kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia, mengambil empat pendekatan, pertama berdasarkan konteks internasional, pengambil keputusan, kondisi politik dalam negeri Indonesia, dan yang terakhir berdasarkan kondisi ekonomi dan militer Indonesia.⁵ Konteks internasional merupakan pendekatan yang berfokus kepada lingkungan internasional pada saat itu, untuk membentuk sebuah kebijakan, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan keadaan dan situasi lingkungan internasional. Pengambilan keputusan adalah pendekatan yang berfokus kepribadian pemimpin negara dalam pembentukan sebuah kebijakan. Sedangkan kondisi politik dalam negeri berfokus kepada lingkungan perpolitikan dalam negeri pada saat itu, pembuat kebijakan akan membuat kebijakan yang menimbang beratkan keadaan politik dalam negeri saat itu, apakah keadaan dalam negeri cukup tenang untuk melaksanakan kebijakan yang akan dibentuk. Dan yang terakhir adalah ekonomi dan militer, pada pendekatan ini pembuat kebijakan harus melihat keadaan ekonomi pada saat pengambilan keputusan, apakah perekonomian negara pada saat

⁴ Anne Booth. "INDONESIA'S ECONOMY: Performance and Policy Options in a Post-OPEC World" Institute of South East Asian Studies, 1986, pp122-136.

⁵William D Coplin. "Introduction to international politics; a theoretical overview.", Markham Pub, 1971.

itu cukup leluasa untuk membentuk keputusan tersebut atau tidak. Sedangkan untuk determinan militer tidak dapat dipakai karena tidak sesuai untuk menganalisa mengapa Indonesia keluar dari OPEC, sehingga penulis tidak akan memasukan determinan ini.

Dan jika dilihat dari sisi kepentingan Negara atau *national interest* menurut Thomas W Robinson, Ia menjelaskan teori yang di kemukakan oleh Morgenthau, bahwa national interest dapat dibagi menjadi enam lapisan. Lapisan pertama adalah *Primary Interest*, yaitu interest yang tak dapat dikompromi atau di kesampingkan. Yang termsauk dalama interest ini adalah identitas kultural, political, dan keamanan dalam negeri dari ancaman asing. Yang kedua yaitu *Secondary Interest*, yaitu interest yang kepentingan dibawah primary interest, tetapi juga vital dalam berkelangsungan suatu negara. Melindungi warga negara yang berada di luar negeri dan mempertahankan kekebalan yang layak bagi para diplomat suatu negara merupakan contoh-contoh dari kepentingan sekunder. Yang ketiga adalah *Permanent Interest* atau interest suatu negara yang sifatnya *Long-term* atau berjangka panjang. Britania Raya selama bertahun-tahun mencoba untuk merealisasikan kebebasan untuk menavigasi laut secara bebas. Yang keempat adalah *Variable Interest*, atau interest yang sifatnya penting untuk *national good*. Yang kelima adalah *General Interest*, interest yang menjadi kepentingan mayoritas masyarakat. Dan lapisan yang terakhir adalah *Specific Interest*, interest ini merupakan kelanjutan dari general interest. Specific interest merupakan kepentingan yang sifatnya spesifik dari general interest, contohnya adalah peningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan produksi dalam negeri di sektor tekstil.⁶

Sedangkan jika dilihat dari pasar minyak internasional yang di tulis oleh Baumeister dan Kilian, ada beberapa faktor yang membuat harga minyak jatuh pada tahun 2014. Mereka beraggapan bahwa jatuhnya harga minyak di Juni 2014, sebenarnya bisa diprediksi jika

⁶ Robinson, Thomas. "A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations." *International Studies Quarterly* Vol. 11, No. 2 (June, 1967), pp. 135-175.

menggunakan vector autoregressive model. Menurut mereka meningkatnya *oil production* dan menurunnya permintaan terhadap minyak di daerah Eropa dan Asia, membuat harga minyak menurun. Fluktuasi terhadap permintaan minyak ini, tentu saja sangat berpengaruh terhadap negara-negara yang mengandalkan minyak sebagai komoditas utama penyumbang GNP. Selain itu keadaan ini diperparah dengan adanya *Slowing Global Economy* atau melambatnya ekonomi global sebelum tahun 2014.⁷

Sedangkan jika dilihat dari hubungan antara minyak dengan komoditas yang lain. Harri, Nalley, dan Hudson beranggapan bahwa sebagian komoditas agrikultur seperti jagung, kacang kedelai dan sayuran lainnya, bersifat terintegrasi pada tahun 2006-2007. Selain itu hasil olahan dari komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk yang dapat menyaingi bahan bakar berbasis fosil yang selama ini dipakai. Menurut mereka jagung yang digunakan untuk *ethanol* dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sumber energi yang terbarukan dapat menggoyangkan jumlah permintaan minyak. Tenarnya *biofuel* seperti ethanol di dunia dapat membuat *crude oil* menurun cukup drastis di masa yang akan datang.⁸

Masuknya kembali Indonesia sebagai anggota OPEC mungkin saja dipengaruhi oleh pengurangan subsidi minyak terhadap masyarakat. Bahkan pengurangan subsidi BBM juga diperlukan berdasarkan sebuah journal World Bank yang ditulis oleh Ndiame Diop pada tahun 2014, Ia mengatakan bahwa kebijakan subsidi Indonesia hanya menambah beban kepada prospek fiskal dan dapat menjadi sumber resiko terhadap neraca perdagangan. Menurutnya pemangkasan subsidi merupakan kebijakan yang adil dan tepat bagi Indonesia. Ini dikarenakan subsidi BBM yang salah sasaran, Ia mencantumkan bahwa dua per tiga masyarakat menengah ke bawah tidak menggunakan bahan bakar dengan volume sebesar yang telah disubsidi oleh

⁷ Baumeister, Christiane and Kilian, Lutz. "Understanding the Decline in the Price of Oil since June 2014".

⁸ Ardian Harri, Lanier Nalley, and Darren Hudson. "The Relationship between Oil, Exchange Rates, and Commodity Prices" *Journal of Agricultural and Applied Economics*, Vol. 41, No.02 (August 2009), pp 501 – 510.

pemerintah, angka ini tentu saja akan berubah dengan adanya peningkatan kuantitas pendapatan perkapita setiap individu. Selain itu dengan adanya kebijakan pemotongan kuota, Indonesia dapat ditransformasi dengan pengelolaan dana yang baik. Dana yang seharusnya untuk subsidi dapat dialihfungsikan untuk pembenahan dalam negeri contohnya dalam sektor infrastruktur.

1.4.2. Kerangka Pemikiran

National Interest:

Dalam menganalisa seberapa penting minyak bagi, Indonesia dapat dianalisa dengan teori kepentingan nasional atau *national interest*. Kepentingan nasional dapat dilihat dari berbagai macam perspektif, jika dilihat dari kaca mata realisme kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power*. Kekuatan secara universal adalah obyektif yang dikejar oleh aktor-aktor internasional, sehingga dengan adanya teori kepentingan nasional dapat memberikan tatanan yang rasional dari perilaku yang ditunjukkan oleh suatu aktor.⁹ Jika dilihat dari level prioritasnya, pengamat dapat membagi "*national*" *interest* menjadi enam bagian; (a) *primary interest*, (b) *secondary interest*, (c) *permanent interest*, (d) *variable interest*, (e) *general interest*, (f) *specific interest*.¹⁰

Kepentingan primer atau (a) *primary interest* adalah kepentingan yang tidak dapat dikompromikan atau diperdagangkan. perlindungan identitas fisik, politik, Semua negara mempunyai kepentingan primer, kepentingan negara yang harus dipertahankan dengan harga apapun. Contoh dari kepentingan ini seperti identitas, teritori, politik, dan budaya bangsa dari campur tangan pihak asing. Selanjutnya adalah kepentingan sekunder atau (b) *secondary interest* adalah kepentingan sebuah negara untuk melindungi rakyat yang berada di luar daerah

⁹ Scott Burchill, "The National Interest in International Relations Theory", Palgrave Macmillan, (2005), 35.

¹⁰ Thomas W. Robinson, "A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations", The Rand Corporation, (Maret 1966), 140-141.

kekuasaan negara tersebut. Misalnya, melindungi tenaga kerja, mahasiswa, diplomat dan lainnya yang berada di luar negeri. Kepentingan permanen atau (c) *permanent interest* adalah kepentingan yang relatif konstan dalam periode waktu yang lama; mereka bervariasi dengan waktu, tetapi hanya secara perlahan. Sedangkan, (d) *variable interest* adalah kepentingan suatu bangsa yang dianggap vital untuk bagi kelangsungan hidup suatu bangsa di suatu keadaan tertentu. Kepentingan variabel adalah hal-hal yang dapat mengubah kepentingan primer dan permanen. Ini dikarenakan kepentingan ini merupakan "*all the cross currents of personalities, public opinion, sectional interests, partisan politics, and political and moral folkways.*" (e) Kepentingan umum atau *general interest* adalah kepentingan yang dapat diterapkan oleh negara dengan skala besar, di dalam beberapa bidang tertentu seperti ekonomi, perdagangan, hubungan diplomasi, hukum internasional dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah (f) *specific interest*, ini merupakan kepentingan yang tidak secara langsung dimasukkan ke dalam kepentingan negara. Kepentingan ini biasanya berdasarkan waktu dan ruang tertentu, dan seringkali merupakan hasil logis dari kepentingan umum.

Sedangkan "*international*" *interest* dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (a) *identical interest*, (b) *complementary interest*, dan (c) *conflicting interest*.¹¹ *Identical interest* adalah kepentingan yang identik antara suatu negara dengan negara yang lain. Contohnya saja Inggris dan AS, mereka mempunyai kepentingan yang sama yaitu memastikan bahwa Eropa tidak dikuasai oleh satu hegemon. Lalu *complementary interest* adalah kepentingan antara suatu negara yang dapat melengkapi dan menunjang kepentingan dari negara lain, sehingga ada sifat simbiosis mutualisme antar dua negara. Sedangkan *conflicting interest* adalah kepentingan suatu negara dengan negara yang sifatnya berlawanan, tidak selaras yang berkemungkinan besar menjadi sumber suatu konflik antara pihak yang saling bertentangan di kemudian hari.

¹¹ Ibid, 141.

Politik Luar Negeri:

Sebagian besar negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda, kebijakan yang dibuat suatu negara yang menganut “sistem politik A” akan cenderung berbeda dengan kebijakan yang dibentuk dengan negara yang menganut “sistem politik B”, bahkan proses pembentukan kebijakan tersebut-pun dapat berbeda. Walau berbeda, setiap negara mempunyai suatu kesamaan, yaitu kepentingan nasional, Coplin menjelaskan bahwa ada empat pertimbangan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Yaitu berdasarkan pertimbangan, (1) konteks internasional, (2) pengambil keputusan, (3) kondisi politik dalam negeri, dan yang terakhir berdasarkan (4) keadaan ekonomi negara.

Pertimbangan pertama adalah konteks internasional, determinan pembuatan kebijakan yang menimbang beratkan pada lingkungan internasional pada saat itu. Negara akan membuat kebijakan luar negeri yang dapat menyesuaikan dengan negara-negara lain. Dalam konteks ini ada beberapa aspek yang harus dipahami, yang pertama yaitu dari segi geografis, yang kedua dari segi ekonomis, dan yang terakhir dari segi politis. Geografis merupakan letak suatu negara atau letak teritorial dari negara tersebut. Kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, perilaku pemberian suara serikat dan keanggotaan bersama dalam organisasi pemerintah. Yang kedua adalah ekonomis, elemen ini mempunyai makna bahwa suatu negara dengan negara lain mempunyai ketergantungan dalam perekonomian, mulai dari arus barang dan jasa sampai arus modal, ini berlaku bagi negara maju dan berkembang. Dan yang terakhir adalah elemen politis. Hubungan politik antara suatu negara dengan lingkungannya sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri negara tersebut. Aliansi bisa berdampak besar terhadap anggotanya dan non-anggota. Ini dikarenakan hubungan aliansi suatu negara dapat mempererat hubungan para anggota dan meningkatkan kompleksitas hubungan antara anggota dengan pihak oposisi.

Pertimbangan kedua yaitu pengambil keputusan, determinan ini berfokus pada kepribadian dan latar belakang sang pengambil keputusan. Berdasarkan pertimbangan ini, karakter seorang pemimpin negara dapat mempengaruhi *decision making proses* sebuah kebijakan. Seorang pengamat dalam menganalisa kebijakan suatu negara tidak dapat sekedar menilai dengan determinan ini saja, tetapi harus dengan kombinasi dari ke empat determinan yang dijelaskan oleh Coplin. Selain itu, sebelum sebuah kebijakan dapat diimplementasikan, kebijakan tersebut harus disetujui oleh institusi-institusi yang mempunyai kewenangan. Maka untuk disahkannya sebuah kebijakan harus melewati tahap evaluasi.

Pertimbangan ketiga yaitu situasi politik domestik, determinan yang berfokus kepada lingkungan perpolitikan dalam negeri. Keadaan domestik suatu negara tentu saja sangat krusial dalam pertimbangan suatu kebijakan luar negeri maupun dalam negeri. Pemerintah akan membuat kebijakan luar negeri yang sesuai dengan keadaan domestik dan yang dapat memenuhi *national interest* dari negara tersebut. Pemerintah akan mencoba semaksimal mungkin untuk membentuk kebijakan luar negeri yang sifatnya tidak memprovokasi keadaan politik dalam negeri.

Pertimbangan yang terakhir adalah situasi ekonomi, proses dimana seorang pembentuk kebijakan melihat dari segi perekonomian negaranya untuk membentuk sebuah kebijakan. Keadaan ekonomi suatu negara merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengambil sebuah kebijakan, entah kebijakan luar maupun dalam negeri. Suatu negara akan membuat kebijakan yang sesuai dengan kekuatan ekonomi dalam negeri, kebijakan ini tentu saja harus memenuhi kepentingan negara tanpa mengguncang ketentraman dalam negeri maupun dunia internasional. Sehingga, negara semaksimal mungkin untuk tidak mengambil resiko untuk

membuat kebijakan luar maupun luar negeri yang bersifat agresif dan dapat membahayakan keadaan ekonomi dalam negeri.¹²

Organisasi International:

Ada berbagai alasan suatu negara menginginkan untuk bergabung ke dalam suatu negara. Untuk menganalisa peran OPEC bagi Indonesia, penulis akan menggunakan konsep peran sebuah organisasi internasional bagi suatu negara yang dijelaskan oleh Archer. Dalam bukunya Archer menjelaskan bahwa peran dan fungsi suatu organisasi internasional merupakan dasar suatu negara untuk bergabung. Archer menjelaskan bahwa organisasi Internasional mempunyai tiga peran bagi negara yang dapat diidentifikasi; (1) instrumen, (2) arena, dan (3) aktor independen.¹³

Pada peran organisasi, organisasi mempunyai peran sebagai instrumen untuk mendapatkan objektif kebijakan luar negeri setiap negara anggota.¹⁴ Potensi penyalahgunaan kekuatan anggota yang dominan dapat terjadi, dengan memaksakan kehendaknya ke pihak atau anggota yang lebih lemah, sehingga membatasi ruang gerak anggota lain. Contohnya saja UN, selama delapan tahun pertama pembentukan organisasi tersebut, banyak pihak yang mengira organisasi ini hanya adalah alat yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melawan USSR. Amerika Serikat menggunakan UN untuk mengendalikan sebagian dari aktifitas USSR pada saat itu, seperti kegiatannya di Eropa Timur; untuk membantu mencegah serbuan Soviet di Iran Utara; sebagai bidan untuk kelahiran dua negara baru Indonesia dan Israel dan aktifitas-aktifitas lain yang dilakukan oleh pihak timur. Suatu organisasi tentu saja tidak dapat terus menjadi instrumen kebijakan dari satu anggota dominan ketika keanggotaannya sangat beragam seperti yang dimiliki oleh PBB. Anggota dominan seperti Amerika Serikat dapat

¹² William D Coplin, *"Introduction to international politics; a theoretical overview."*, Markham Pub, 1971.

¹³ Clive Archer. *"International Organizations."* 3rd edition (London: Routledge 2001), 65-68.

¹⁴ Ibid, 68-70.

dengan mudah untuk mengarahkan kemauannya jika mayoritas dari anggota mempunyai kepentingan yang sama, kepuasan dari sebagian besar anggota dengan kegiatan AS di PBB seperti yang terjadi pada 1945 hingga 1953.

Sedangkan pada bagian kedua, yaitu organisasi mempunyai peran sebagai arena. Dalam hal ini, organisasi menyediakan tempat pertemuan bagi anggota untuk berkumpul bersama untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama atau tidak setuju.¹⁵ Sebuah arena mempermudah akses aktor ke masalah (dan sebaliknya), dengan adanya pemudahan akses masalah diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan di panggung yang formal untuk pengambilan keputusan. Selain itu, organisasi internasional dapat leluasa menentukan aturan, lokasi, dan waktu keputusan "permainan" dan mengembangkan "budaya" informal yang terjadi saat pertemuan.¹⁶ Sehingga dalam hal ini mereka hanya memfasilitasi dan mengatur saat berlangsungnya pertemuan dari negara-negara anggota untuk bernegosiasi. Contohnya saja, selama tahun 1970-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa digunakan oleh negara-negara *Non-Block* untuk menyuarakan pandangan mereka tentang masalah Orde Ekonomi Internasional Baru (NIEO).¹⁷ Sistem baru didasarkan pada kekuatan ekonomi Amerika, dimana transaksi perekonomian dunia akan menggunakan US dolar sebagai mata uang utama, dan kesepakatan untuk setiap anggota meliberalisasi pasar dan dapat mengizinkan pertukaran mata uang sehingga pada akhirnya pasar bebas dapat diciptakan untuk di dunia dan ketergantungannya.

Pada bagian yang terakhir organisasi internasional mempunyai peran sebagai aktor yang "aktor independen".¹⁸ Tentu saja jika menganalisa sifat independen organisasi internasional sedikit bahkan mungkin saja tidak ada yang bersifat seratus persen independen, tanpa ada

¹⁵ Ibid, 73-74.

¹⁶ Arild Underdal, "The Roles of IGOs in International Environmental Management: Arena or Actor?" *The Role of Regional Organizations in the Context of Climate Change*, Global Environmental Change, Vol. 14, (Oktober 1992): 153.

¹⁷ Clive Archer, Op cit.

¹⁸ Ibid, 79-80.

pengaruh dari kekuatan luar maupun pengaruh dari anggota yang dominan. Tanpa adanya otonomi bagi setiap anggota, anggota non-dominan akan berperan menjadi boneka saja.¹⁹ Arnold Wolfer menjelaskan bahwa organisasi internasional dapat menjadi sebuah aktor internasional di saat para anggota dapat mengidentifikasi dirinya sebagai salah satu bagian dari entitas tersebut. Sehingga organisasi harus memiliki sifat koherensi internal, dan melakukan kegiatan eksternal yang relevan. Selain itu organisasi tersebut juga harus diakui oleh pihak di luar anggota, karena pengakuan itulah yang membuat mereka dapat mempunyai pengaruh di dunia internasional. Contohnya saja OPEC pada tahun 1970-an, organisasi itu dapat meningkatkan harga minyak secara sepihak. Ini dapat dikategorikan bahwa OPEC merupakan aktor yang diakui dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga minyak dunia pada saat itu.

Berdasarkan Archer ada sembilan fungsi dari organisasi internasional yang dapat diteliti; Articulation and Aggregation, Norms, Recruitment, Socialization, Rule Making, Rule Application, Rule Adjudication, Information, dan Operation. Tetapi pada skripsi ini penulis hanya akan menggunakan fungsi yang berhubungan dengan fungsi OPEC bagi Indonesia, yaitu Articulation and Aggregation, Socialization, dan information.²⁰

Mula-mula fungsi sebuah organisasi internasional adalah artikulasi dan agregasi, berdasarkan Archer organisasi internasional dapat melakukan artikulasi dan agregasi dalam *international affairs*. Artikulasi adalah berfungsi untuk menyatakan kepentingan setiap anggota entah individu, *decision makers* dari suatu negara bahkan juru bicara pihak yang terkait.²¹ Sedangkan, agregasi adalah proses ketika tuntutan beberapa unit digabungkan dan diselaraskan untuk mengurangi inkonsistensi antar anggota, dan secara kolektif diadvokasikan

¹⁹ Arild Underdal, OP cit.

²⁰ Clive Archer, Op cit, 92-94.

²¹ Michael Haas, "A Functional Approach to International Organization." The Journal of Politics, Vol. 27, No. 3 (Agustus 1965), 502-503.

sebagai satu "paket".²² Contohnya saja, insiden yang terjadi di sektor pertambangan, persatuan penambang nasional menyatukan semua buruh yang bekerja di industri pertambangan batu bara untuk menyuarkan tuntutan mereka kepada *employer* mereka, seperti hak untuk mendapatkan upah, kondisi kerja yang lebih baik dan tuntutan lainnya yang telah diagregasi dari setiap individu (penambang) yang dikumpulkan, yang menjadi suara nasional.²³

Sedangkan pada fungsinya yang kedua adalah agen yang menetapkan norma-norma di berbagai sektor.²⁴ Contohnya saja, ada beberapa INGO di abad ke-19 yang gencar mempromosikan nilai atau norma yang diterapkan di Eropa Barat dan Negara-negara Amerika Utara. Pada saat itu nilai-nilai yang ditekankan oleh INGO zaman tersebut seperti penolakan terhadap perbudakan (*Anti-Slavery Society*), pengontrolan atas efek perang (*the International Committee of the Red Cross*), perlindungan masyarakat lokal (*Aborigines' Protection Society*) dan seterusnya. Selain itu dengan adanya organisasi internasional yang mewajibkan semua anggotanya untuk mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama, memberikan insentif lebih lanjut bagi para anggota untuk mengikuti norma yang telah diterapkan. Sehingga secara tidak langsung norma atau nilai yang diterapkan oleh negara-negara di dunia pada saat ini sebagiannya merupakan akumulasi dari nilai atau norma yang dipromosikan oleh organisasi internasional.

Lalu pada poin yang ketiga adalah rekrutmen anggota dalam sistem politik internasional.²⁵ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya organisasi internasional mempunyai peran sebagai arena, tempat dimana semua pihak dapat menyuarkan pendapat dan kepentingannya. Dengan adanya peran tersebut banyak pihak dari calon negara berdaulat maupun negara-negara berkembang yang tergiur untuk bergabung, dengan tujuan suara mereka

²² Ibid, 504.

²³ Clive Archer, Op cit, 94-95.

²⁴ Ibid, 96.

²⁵ Ibid, 98-99.

dapat didengar oleh negara berdaulat maupun negara maju. Dengan adanya kesempatan untuk bersuara ini, memungkinkan untuk setiap anggota untuk berdiplomasi dalam memenuhi kebutuhan negara masing-masing.

Selanjutnya adalah fungsi keempat adalah sosialisasi, dapat dilihat dengan dua konteks; dalam negeri dan sosialisasi skala global.²⁶ Jika menganalisa dengan sisi pandang dalam negeri, sosialisasi dalam suatu negara mempunyai tujuan untuk menanamkan loyalitas ke setiap individu terhadap suatu sistem. Sosialisasi dapat dilakukan di dalam sebuah negara oleh beberapa macam lembaga, seperti sekolah, rumah ibadah, dan ormas semuanya dapat digunakan sebagai agen sosialisasi. Sedangkan sosialisasi secara global digunakan untuk negara berdiplomasi dan berkerja sama satu sama lain, organisasi internasional mempunyai fungsi yang penting dalam tahap ini, karena dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam pelaksanaan.

Fungsi kelima dari organisasi internasional adalah pembuatan aturan.²⁷ Pembentukan aturan dalam organisasi internasional, sangatlah berbeda dengan sistem politik dalam negeri. Dalam dunia internasional, tidak mempunyai lembaga formal yang khusus membuat aturan, seperti pemerintah atau parlemen. Sehingga organisasi internasional hanya membuat aturan yang dapat diimplementasikan untuk para anggota, dan mereka tidak dapat memaksakan pihak non-anggota untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang mereka terapkan. Dengan banyaknya jumlah organisasi maka sumber-sumber peraturan internasional lebih beragam, karena tidak adanya pemerintah dunia. Selain peraturan yang dibentuk oleh organisasi internasional untuk anggotanya, ada juga sumber-sumber peraturan yang diikuti negara-negara internasional yang didasarkan pada penerimaan praktik masa lalu atau pada pengaturan *ad hoc*.

²⁶ Ibid, 99-100.

²⁷ Ibid, 102.

Fungsi keenam adalah pengimplementasian aturan.²⁸ Untuk menegakkan hukum dalam skala global, berbeda dengan penegakan dalam negeri. Jika dalam sistem politik domestik ada agen-agen yang dapat menegakkan hukum, maka penerapan aturan internasional diserahkan kepada negara berdaulat berdasarkan anggapan baik. Walau seperti itu, bukan berarti organisasi internasional tidak memiliki peran terkait permasalahan ini, IGO dan INGO masih dapat berperan sebagai pengawas saja dan tidak dapat menegakkan hukum jika ada pelanggaran. Contohnya saja IGO terhadap penerap energi nuklir, mereka dapat melacak penyebaran dan penggunaan material-material yang mungkin saja akan dipersenjatakan.

Fungsi ketujuh adalah ajudikasi peraturan.²⁹ Dalam fungsi ini, organisasi internasional seperti ICJ hanya dapat yang jadi penentu jika pihak-pihak yang berkonflik setuju untuk menyelesaikan permasalahannya lewat ICJ. Tentu saja penanganan sebuah konflik lewat organisasi internasional dipersulit karena kurangnya peraturan yang pasti, dan tidak semua peraturan internasional dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Sehingga penanganan konflik skala internasional mempunyai tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan penanganan konflik domestik dalam suatu negara.

Fungsi kedelapan adalah informasi atau memberikan informasi.³⁰ Oleh karena itu banyak negara berkembang yang tertarik untuk bergabung karena fungsi organisasi internasional yang sebagai penyedia informasi. Dengan adanya informasi yang disediakan oleh organisasi, negara anggota tidak memerlukan untuk menggali informasi terkait sektor tersebut secara mendalam, sehingga jika digunakan secara ekstensif dan di jangka yang panjang akan menghemat biaya yang cukup besar. Peningkatan jumlah organisasi internasional merupakan adanya peningkatan teknologi di bidang komunikasi, meningkatnya dan penggunaan media

²⁸ Ibid, 104-105.

²⁹ Ibid, 106.

³⁰ Ibid, 107.

komunikasi dapat memudahkan para negara anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Selain itu dengan maraknya penggunaan teknologi komunikasi dan internet memudahkan anggota untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diberikan oleh pihak organisasi, sehingga negara berdaulat mempunyai kemungkinan yang jauh lebih kecil, bahkan tidak dapat lagi memberikan data yang *invalid*. Contohnya saja pengamat cuaca dunia dari Organisasi Meteorologi Dunia memberikan informasi tentang prediksi cuaca, layanan ilmiah dari Organisasi Kesehatan Dunia.

Lalu fungsi yang terakhir adalah operasi, dalam hal ini adalah melakukan sebagian proses operasional di dunia internasional.³¹ Contoh dari fungsi ini seperti perbankan (Bank Dunia) yang dapat meminjamkan negara-negara di dunia untuk rekonstruksi dan pembangunan. Selain di sektor perbankan, organisasi juga bergerak di proses penyediaan bantuan yang dilakukan oleh badan PBB dan INGO yang bergerak di bidang kemanusiaan, Sehingga dengan adanya fungsi-fungsi dari organisasi internasional membentuk adanya *Global Governance*.³² *Global Governance* tidak sama dengan *World Government*, sehingga membuat *global governance* hanya sebatas hubungan antar pemerintah, yang terkadang diikuti sertai oleh aktor non-pemerintah, dan hanya memiliki kontrol yang terbatas yang biasanya sudah disepakati oleh pihak yang terkait.

1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian dari pengertian peneliti yang didasarkan pada interpretasi data. Strategi kualitatif yang digunakan adalah studi kasus dari journal, artikel dan buku-buku yang telah di rilis oleh sumber yang terpercaya.

³¹ Ibid, 107-108.

³² Ibid.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada empat jenis cara yang dapat digunakan, berdasarkan John W Cresswell. Cara yang pertama adalah wawancara, kedua pengamatan, ketiga studi dokumen, dan yang terakhir adalah audio visual. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan cara yang kedua dan yang ketiga, yaitu pengamatan dan studi dokumen. Dokumen yang didapatkan merupakan dari sumber-sumber yang kongkrit dan kredibel, yaitu jurnal akademik dan buku-buku di publikasikan oleh penulis yang ahli dalam bidangnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan mencakup lima bagian, seperti yang sudah di cantumkan diatas pada bab satu, bab ini menjelaskan akan menjelaskan detail dari skripsi ini. Mulai dari latar belakang masalah, sebagaimana penting penelitian ini untuk dilakukan, sampai dengan teori yang digunakan dan literature yang dijadikan sebagai referensi. Bab satu merupakan bab pendahuluan saja dan hanya membahas secara ringkas permasalahan yang akan dibahas dan metode yang akan digunakan untuk menganalisa masalah tersebut.

Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan sejarah OPEC, bagaimana OPEC bisa terbangun dan siapa saja yang menjadi negara pelopor OPEC. Lalu pada bab ini juga akan menjelaskan tentang kaitan antara OPEC dan pasar minyak internasional, mengapa OPEC dapat menjadi salah satu organisasi exporter minyak yang berpengaruh. Selanjutnya akan dijelaskan misi dari OPEC itu sendiri, apa tujuan utama OPEC dan para anggotanya di pasar internasional. Walau banyak negara berkembang yang tertarik dan telah menjadi anggotanya, namun banyak juga yang keluar dari keanggotaannya, sehingga dalam bagian ini akan dicantumkan juga negara-negara mana sajakah yang masih aktif dalam organisasi ini. Pada

bagian terakhir, penulis akan mencoba menggunakan konsep peran dan fungsi organisasi yang dikemukakan oleh Clive Archer.

Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan kaitannya Indonesia dengan organisasi ini. Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat konsumsi minyak yang besar. Tingkat konsumsi minyak yang besar tersebut, sebagian besar ditunjang oleh subsidi pemerintah. Awalnya pemerintah merancang kebijakan subsidi BBM ini untuk membantu rakyat menengah ke bawah, tetapi banyak masyarakat yang salah menggunakan kebijakan ini. Dengan adanya kebijakan ini, banyak masyarakat yang tergolong masyarakat menengah ke atas, mengonsumsi dan menggunakan jenis BBM bersubsidi. Sehingga banyak pihak yang menilai bahwa subsidi BBM merupakan subsidi yang salah sasaran dan tidak mengarah kepada rakyat kecil. Sehingga pada bab ini juga penulis akan mencoba menganalisa seberapa besar subsidi BBM Indonesia untuk masyarakatnya, mengapa pemangkasan subsidi BBM akan menjadi kebijakan yang tepat, dan kaitannya Indonesia bergabung kembali dengan OPEC.

Sedangkan pada bab yang terakhir, penulis akan menjelaskan kesimpulan dan hasil dari penelitian. Selain itu penulis juga akan melihat implikasi yang dapat digunakan pada tulisan ini, untuk pembaca. Dan tulisan ini akan ditutup dengan daftar nama-nama penulis yang berkontribusi sebagai sumber acuan dari skripsi ini.

